

## Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Korupsi Minyak Goreng

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

“(Pemeriksaan saksi) untuk lima orang tersangka yaitu IWW, MPT, SM, PTS, dan LCW alias WH,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada awak media, Jakarta, Kamis (19/5).

Adapun saksi yang diperiksa yakni, APP selaku Analis PT Independent Research & Advisory Indonesia. Lalu, MW selaku Analis PT Independent Research & Advisory Indonesia. Dan YB selaku Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm

Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” ujar Ketut.

Dalam kasus izin ekspor ini, Kejagung awalnya menetapkan empat tersangka. Mereka adalah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, lalu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS.

Terbaru, Kejagung juga menetapkan Lin Che Wei (LCW) dalam perkara tersebut. Ia diduga memiliki peran bersama dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) memuluskan pemberian izin ekspor ke beberapa perusahaan. ● han

## Giliran Rumah Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Digeledah KPK

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan tindakan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai minimarket di Kota Ambon, hari ini, Kamis (19/5).

Pengeledahan kali ini menasar ke rumah tersangka Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL). Selain rumah Richard, penyidik masih mencari bukti tambahan terkait kasus ini di beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Ambon.

“Hari ini (19/5) upaya paksa penggeledahan masih dilakukan tim penyidik yang berlokasi di beberapa SKPD Pemkot Ambon dan rumah kediaman dari pihak-pihak terkait,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (19/5).

Belum diketahui apa saja yang berhasil diamankan pada upaya paksa penggeledahan hari ini. Sebab, kata Ali, proses penggeledahan di rumah Richard Louhenapessy dan beberapa lokasi lainnya masih berlangsung hingga siang ini.

“Informasi yang kami terima, kegiatan saat ini masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan akan kami sampaikan kembali,” pungkasnya.

KPK menetapkan Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai minimarket di wilayahnya. Richard Louhenapessy juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Richard Louhe-

napessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Karyawan AlfaMidi Kota Ambon, Amri (AR).

Dalam perkara ini, Richard diduga aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel AlfaMidi di Kota Ambon. Dalam berbagai pertemuan, Amri diduga kerap meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard Louhenapessy kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard Louhenapessy diduga meminta agar ada penyerahan uang minimal Rp25 juta dengan menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Andrew Erin Hehanussa adalah orang kepercayaan Richard.

Sementara itu, khusus untuk penerbitan terkait persetujuan izin prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira Rp500 juta. Uang itu diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Richard diduga juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. ● han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## MENKOPOLHUKAM KUNJUNGI TAMAN MAKAM PAHLAWAN SEROJA

Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (kedua kiri) menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Seroja di Kota Dili, Timor Leste, Kamis (19/5). Taman Makam Pahlawan Seroja merupakan tempat pemakaman para prajurit Indonesia yang gugur di Timor Leste.

# Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

PAN, Golkar, dan PPP yang bergerak cepat cepat lebih awal membentuk koalisi Indonesia Bersatu sangat diuntungkan. Pembentukan KIB ini menunjukkan tren politik saat ini sudah harus berubah.

JAKARTA (IM) - Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka untuk mengusung calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dari kalangan non-partai politik.

Menurut Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berbeda dengan partai lain yang sudah mematok capres atau cawapresnya sehingga menutup kemungkinan mengusung capres/cawapres dari luar partai.

“Masih terbuka untuk dibicarakan bersama dalam memilih figur capres/cawapres yang tepat, memiliki elektabilitas tinggi dan yang pasti diterima oleh masyarakat. Baik itu dari kalangan kader partai maupun non-partai,” kata Zainut dalam siaran pers, Kamis (19/5).

Zainut menuturkan, KIB merupakan koalisi berbasis kesetaraan yang memungkinkan semua pihak terlibat dan menjadi penentu dalam me-

mutuskan arah dan kebijakan strategis bersama, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Zainut mengatakan, hal itu merupakan modal dasar untuk membangun sebuah koalisi yang kokoh, rasional, dan bermartabat.

“Bukan koalisi transaksional pragmatis yang hanya untuk kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

KIB terbentuk, kata Zainut, berangkat dari gagasan, visi, dan misi yang sama antara ketiga partai untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

“Koalisi Indonesia Bersatu ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat dan bermartabat, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, memajukan harkat martabat kemanusiaan, memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah dan mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan,” kata Zainut.

Sebagaimana diketahui, KIB sudah mengamankan tiket pencalonan presiden karena

total perolehan suara ketiga partai telah melewati ambang batas pencalonan presiden. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnya.

Adapun jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

## Diuntungkan

Menurut pengamat politik dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Indonesia, Arya Fernandes, PAN, Golkar, dan PPP mempunyai sejumlah keuntungan dengan bergerak cepat membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Arya menilai pembentukan koalisi menunjukkan tren politik saat ini sudah harus berubah.

“Memang saya kira tren politik kita kedepan harus berubah dan saya kira penting bagi partai-partai untuk mengadopsi koalisi lebih awal,” kata Arya kepada wartawan, Kamis (19/5).

Menurut Arya, keuntungan yang pertama bagi ketiga partai itu dengan membentuk koalisi secepat mungkin adalah mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan konsolidasi.

“Pertama agar partai me-

iliki banyak waktu untuk sama-sama membicarakan platform politik apa yang akan mereka bangun dan perjuangan agar koalisi tersebut mememangkan pemilihan presiden,” ujar Arya.

Alasan kedua, kata Arya, pembentukan koalisi yang lebih awal ini justru menguntungkan calon pemilih. Sebab menurut dia, para pemilih bisa mengikuti rekam jejak dari para bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang dibidik untuk diusung.

“Kedua, dari sisi pemilih penting untuk melihat bagaimana track record, kredibilitas, dan kompetensi yang akan diusung oleh koalisi tersebut. Sehingga pemilih punya banyak waktu untuk me-

nentukan seleksi bakal calon presiden,” ujar Arya.

“Selama ini kan trennya koalisi itu di akhir jelang pendaftaran, apa yang dilakukan Golkar cs ini adalah langkah bagus untuk memberikan satu model baru pembentukan koalisi di Indonesia,” kata Arya menambahkan.

Terakhir, Arya menyebut pembentukan koalisi yang lebih awal juga penting untuk mendekati atau memobilisasi para pemilih.

“Karena kalau partai-partai belum memberikan kepastian, maka calon-calon presiden dan wakil presiden ini akhirnya menunda untuk memberikan mobilisasi kepada masyarakat,” ucap Arya. ● han

## Ketua KPK Sebut Harun Masiku Tak akan Tidur Nyenyak, ICW: Lip Service Saja

JAKARTA (IM) - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menganggap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri tak serius ketika menyebutkan pihaknya bakal memburu Harun Masiku hingga dia tidak akan bisa tidur nyenyak.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Ia telah menjadi buronan sejak Januari 2020.

“Kalau pun ada pernyataan, baik Firlil maupun Pelaksana Tugas Jubit Penindakan KPK, kami duga hanya sekadar lip service semata,” kata Kurnia kepada wartawan, Kamis (19/5).

Harun telah buron selama lebih dari 850 hari. Terkait ini, Kurnia mengaku pihaknya tak terkejut. ICW bahkan yakin hingga akhir masa jabatannya Firlil dan pimpinan KPK lain akan terus berkilah dengan bermacam argumentasi untuk menunda pencarian Harun Masiku. ICW menduga, sumber persoalan pencarian Harun Masiku justru berada di KPK.

Kurnia menilai, Firlil takut berhadapan dengan aktor politik besar yang selama ini berada di balik buronan tersebut.

“Sebab, jika Harun Masiku ditangkap, maka aktor politik besar itu sudah barang tentu akan turut diproses hukum,” ujarnya.

Menurut Kurnia, sejak kasus ini dibongkar oleh tim penyidik dan penyidik KPK, Firlil sudah tahu bahwa ada seorang aktor politik besar yang akan terseret jika perkara ini dilanjutkan. Oleh karenanya, tak heran jika kini KPK terlihat enggan untuk meringkus Harun Masiku.

“Gejala keengganan itu sudah tampak sejak awal, ada banyak, salah satunya pemberhentian pegawai-pegawai yang sempat ditugasi mencari buronan tersebut,” ucap Kurnia.

Namun demikian, lanjut Kurnia, masih ada harapan untuk menangkap Harun Masiku, setidaknya melalui 3 cara. Pertama, pimpinan KPK saat ini, terutama Firlil, tidak menjabat lagi di periode mendatang atau 2023-2027. Kedua, Undang-Undang KPK dikembalikan seperti sedia kala seperti sebelumnya.

“Ketiga, tim pencari Harun Masiku yang dipecah melalui TWK (tes wawasan kebangsaan), dikembalikan ke KPK,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firlil Bahuri menyebutkan, pihaknya masih memburu Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan yang terangkut kasus dugaan suap PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Harun diduga menyuarai Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar KPU menetapkan sebagai anggota DPR. Firlil mengaku yakin Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak hingga kini karena menjadi buron.

“Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti terangkut,” kata Firlil kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Firlil mengatakan KPK juga mengejar buronan untuk kasus korupsi yang lain. Setidaknya, masih ada 6 buron yang dikejar KPK. Meski demikian, dia enggan membeberkan identitas buron lain yang masih diburu itu. ● han



## ANGGARAN PERBAIKAN GEDUNG KURA-KURA DPR

Suasana dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5). Sekretaris Jenderal DPR menganggarkan sebesar Rp4,5 miliar untuk perbaikan gedung tersebut.

## Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat Distop MKD

JAKARTA (IM) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik anggota Komisi IX DPR Harvey Malaihollo yang kedapatan menonton video porno saat sedang rapat. Keputusan itu diambil setelah MKD meminta klarifikasi dari Harvey pada Kamis (19/5) siang.

“Kami sampaikan bahwa untuk perkara Pak Harvey kami nyatakan sudah selesai tanpa memeriksa pokok perkara,” kata anggota MKD Junimart Girsang kepada wartawan, Kamis (19/5).

Dalam proses klarifikasi tersebut, Harvey juga menyampaikan permohonan

maaf kepada masyarakat Indonesia melalui MKD DPR. “Pak Harvey sudah menyampaikan permintaan maaf dan kami sudah arahkan juga supaya ini menjadi peringatan ke depan karena apa pun yang dilakukan oleh anggota DPR itu selalu akan termonitor oleh rekan-rekan pers dan/atau masyarakat lainnya,” kata Junimart.

Sebelumnya, seorang anggota DPR tertangkap kamera diduga tengah menonton video porno saat rapat. Belakangan, diketahui bahwa sosok anggota DPR itu adalah anggota dewan dari Fraksi PDI-P, Harvey Malaihollo. ● han

## ART Kuras ATM Mantan Majikan Rp110 Juta Buat Beli Motor hingga Emas

TOMOHON (IM) - Seorang perempuan berinisial TM (31) ditangkap Tim Resmob Polres Tomohon. Perempuan yang pernah menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) merupakan tersangka pencurian uang ratusan juta milik mantan majikannya, di Kelurahan Matani Tiga Kecamatan Tomohon Tengah.

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, tersangka yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga itu diamankan pada hari Senin (16/5) saat berada di wilayah hukum Polsek Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Menurutnya, pelaku nekat melakukan aksi pencurian uang milik korban bernama Chitra Le, yang merupakan majikan pelaku dengan cara membobol ATM milik korban.

“Pelaku mengakui mengambil kartu ATM milik korban selanjutnya mengasak uang pelaku hingga mencapai Rp110 juta, sedangkan uang Rp10 juta lainnya, pelaku curi di bawah rak pakaian milik korban, jadi total uang yang dicuri sebanyak Rp120 juta,” ujar Jules Abraham Abast, Kamis (19/5).

Aksi pelaku diketahui saat korban mengecek rekening banknya, dan ternyata sudah terjadi transaksi penarikan uang yang diakui bukan dilakukan oleh korban sendiri.

“Mengetahui uang di dalam rekeningnya sudah ditarik seseorang, korban pun meminta konfirmasi kepada pihak bank, dan pihak bank pun membenarkan hal tersebut,” terangnya.

Kejadian ini kemudian dilaporkan korban ke Polres Tomohon pada 21 April 2022 lalu. Berdasarkan laporan korban, Tim Resmob segera melakukan penyelidikan dan memeriksa

rekaman CCTV di beberapa gerai ATM dan akhirnya dugaan pelaku mengerucut pada seorang asisten rumah tangga yang sudah tidak bekerja lagi di rumah korban.

Dari bukti-bukti awal tersebut, Tim Resmob kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku dengan berkoordinasi bersama personel Polsek Tabukan Utara dan akhirnya berhasil menangkap pelaku.

“Pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan dan ia mengaku telah melakukan pencurian tersebut sejak September 2021,” tuturnya.

Pelaku juga mengaku telah membelikan sejumlah barang dari hasil uang curian, antara lain satu unit sepeda motor, barang perhiasan emas, beberapa perabot rumah tangga, jam tangan dan tas. “Saat ini pelaku bersama sejumlah barang bukti sudah diamankan di Polres Tomohon guna pemeriksaan lebih lanjut,” katanya. ● mei

## PENGUMUMAN

Sehubungan dengan proses likuidasi yang sedang dilaksanakan PT WACHYUNI MANDIRA (dalam Likuidasi) (selanjutnya disebut Perseroan), dan guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, telah diumumkan pembubaran dan likuidasi Perseroan dan panggilan terhadap kreditur Perseroan untuk mengajukan tagihan atas utang Perseroan;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2022, Perseroan tidak menerima tagihan dari kreditur. Sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan sehubungan dengan utang piutang Perseroan;
- Bahwa Likuidator telah melakukan verifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan Neraca per tanggal 31 Maret 2022, tercatat sisa harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebesar Rp. 117.281.701,- yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan;

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Sumatera, 20 Mei 2022  
Likuidator  
PT WACHYUNI MANDIRA (dalam Likuidasi)

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND (“SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND”), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sehubungan dengan perubahan metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyerahan dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyerahan baru, yang semula ditetapkan “sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyerahan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang berjalan” menjadi “sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyerahan tersebut diterbitkan”.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

**SYAILENDRA** Jakarta, 20 Mei 2022  
Manajer Investasi  
PT Syailendra Capital  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan